

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SKPD KECAMATAN LUNANG  
TAHUN 2016 - 2021**



**KECAMATAN LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra OPD Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Lunang dan masyarakat, maka penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Lunang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra OPD Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan pembangunan

yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Lunang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## **1.2. LANDASAN HUKUM.**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD.**

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Lunang. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan berbagai kebijakan dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **1.3.2. TUJUAN.**

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Lunang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Lunang.
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

#### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN.**

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi OPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

1. Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) diatas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan, yang meliputi :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi



4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan; dan
8. Penyelenggaraan

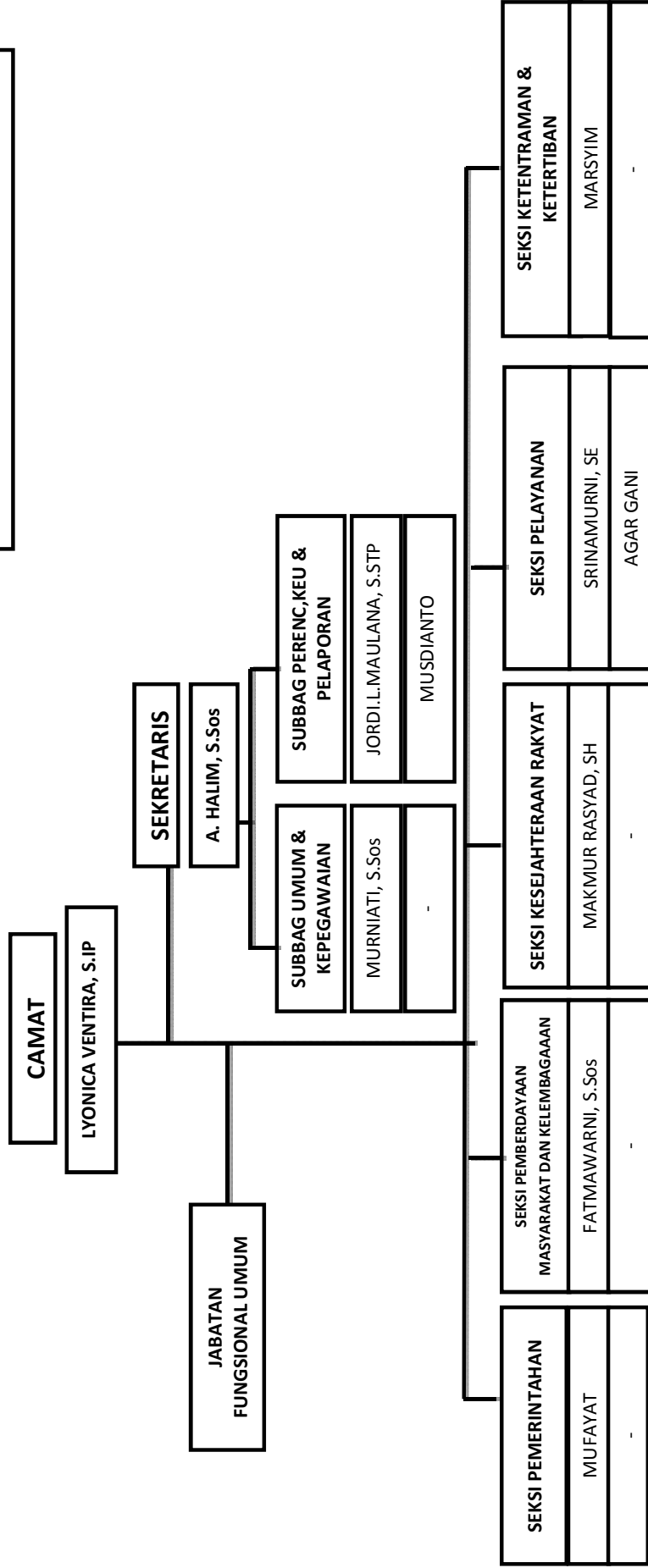
### **2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 0 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kedudukan Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan, Susunan Organisasi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut ;

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10. Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LUNANG

Dasar: Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017  
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata  
Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan



## **2.2. SUMBER DAYA SKPD**

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Lunang, sebagai berikut:

I. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

1. Camat / Eselon III A : 1 orang
2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 5 orang
4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
5. Staf Pelaksana : 2 orang

II. Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan :

1. Golongan IV : 1 orang
2. Golongan III : 8 orang
3. Golongan II : 2 orang
4. Golongan I : - orang

III. Kondisi Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan :

1. Sarjana / S2 : - orang
2. Sarjana / S1 : 7 orang
3. Diploma III : - orang
4. Diploma I : - orang
5. SLTA/Sederajat : 4 orang
6. SLTP : - orang

## **2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD**

Kinerja Kantor Camat Lunang tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja sasaran ini rata-rata melebihi capaian target yang telah dibuat oleh Kantor Camat Lunang. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Camat Lunang menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program seperti tampak dalam table berikut ini :

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA PELAYANAN KANTOR CAMAT LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu	75%	80%	80%	80%	85%	75%	80%	80%	80%	85%	75%	80%	80%	80%	85%
2.	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	C Skala	B Skala	B Skala	BB Skala	BB Skala	C Skala	B Skala	B Skala	BB Skala	BB Skala	C Skala	B Skala	B Skala	BB Skala	BB Skala
3.	Jumlah Nagari yang Pengelolaan Keuangannya Baik	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari

**TABEL**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LUNANG**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Belanja Tidak Langsung	0	0	0	903.500.224	985.447.414	0	0	0	880.908.523	956.960.991	0	0	0	97,49	97,10								
Belanja langsung	0	0	0	435.839.870	523.522.900	0	0	0	434.673.878	523.168.000	0	0	0	99,73	99,93								

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

### **OPD**

#### **2.4.1. TANTANGAN**

1. Dengan sudah besarnya pagu dana dinagari yang bersumber dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa (DD) ini mengharuskan Camat melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagari secara intensif.
2. Pelayanan public yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi elektronik mengharuskan aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumberdaya manusianya.

#### **2.4.2. PELUANG**

1. Adanya kesempatan bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Adanya sumberdaya alam berupa objek wisata untuk dikembangkan, seperti Situs Budaya Mandeh Rubiah di nagari Lunang.
3. Dengan adanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berada di Kecamatan Lunang menjadikan Kecamatan Lunang Lebih di Kenal di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat karena TTG dari Kecamatan Lunang mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pada Lomba TTG tingkat Provinsi dan sudah membuat produk2 unggulan dari teknologi tepat gunanya.
4. Dengan adanya bantuan Rice Milling Model Plan (RMP) atau lebih dikenal dengan Heler Terbarukan dari Kementerian Desa yang memiliki kapasitas heler yang besar maka Kecamatan Lunang akan melakukan Louncing Beras Rajo Pasisia sehingga beras yang berasal dari Kecamatan Lunang juga dikenal oleh masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
5. Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas (UBK) Karya Bersama di Kecamatan Lunang yang pada Tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Kementerian Transmigrasi berupa Alat pembuat Minyak Goreng dan Alat pembuat

dodol Jagung yang mulai beroperasi pada tahun 2017 maka Kecamatan Lunang juga dapat mempromosikan minyak goreng dan dodol jagung buatan masyarakat Lunang.

6. Dengan Dana Desa (DD) yang cukup besar dari APBN maka kecamatan Lunang akan melakukan pembinaan kepada nagari se Kecamatan Lunang untuk dapat menggali produk unggulan masing-masing nagari sehingga nagari se Kecamatan Lunang memiliki Produk unggulannya baik itu dari sektor Pertanian, Perkebunan dan Perternakan yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lunang.

### **BAB III**

## **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

### **3.1. IDENTIFKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

Camat sebagai perangkat daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yangmana camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan social. Isu-isu strategis di Kecamatan Lunang adalah :

#### 1. Kondisi Internal

- Tersedianya sumber daya manusia
- Sarana dan prasarana yang tersedia
- Masih kurangnya anggaran yang tersedia

#### 2. Kondisi Eksternal

- Banyaknya kegiatan disemua bidang dinagari yang seharusnya dimonitor akan tetapi, sejumlah staf yang belum dapat difungsikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

Prediksi keadaan Kecamatan Lunang 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :



## 1. Faktor Internal

Kekuatan :

- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Lunang yang baik
- Kecamatan Lunang sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan perternakan
- Disektor kepariwisataan Kecamatan Lunang mempunyai potensi wisata Situs Budaya Mandeh Rubiah

Kelemahan :

- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari Kabupaten,Provinsi dn Kementerian.

## 2. Faktor Eksternal

Opportunities (peluang) :

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat/pelatihan
- Pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang ada lewat dinas instansi terkait
- Dengan adanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berada di Kecamatan Lunang menjadikan Kecamatan Lunang Lebih di Kenal di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat karena TTG dari Kecamatan Lunang mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pada Lomba TTG tingkat Provinsi dan sudah membuat produk2 unggulan dari teknologi tepat gunanya.

- Dengan adanya bantuan Rice Milling Model Plan (RMP) atau lebih dikenal dengan Heler Terbarukan dari Kementerian Desa yang memiliki kapasitas heler yang besar maka Kecamatan Lunang akan melakukan Louncing Beras Rajo Pasisia sehingga beras yang berasal dari Kecamatan Lunang juga dikenal oleh masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
- Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas (UBK) Karya Bersama di Kecamatan Lunang yang pada Tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Kementerian Transmigrasi berupa Alat pembuat Minyak Goreng dan Alat pembuat dodol Jagung yang mulai beroperasi pada tahun 2017 maka Kecamatan Lunang juga dapat mempromosikan minyak goreng dan dodol jagung buatan masyarakat Lunang.
- Dengan Dana Desa (DD) yang cukup besar dari APBN maka kecamatan Lunang akan melakukan pembinaan kepada nagari se Kecamatan Lunang untuk dapat menggali produk unggulan masing-masing nagari sehingga nagari se Kecamatan Lunang memiliki Produk unggulannya baik itu dari sektor Pertanian, Perkebunan dan Perternakan yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lunang.

#### Threats (ancaman)

- Masih kurang maksimalnya hasil pertanian dan perkebunan diwilayah Kecamatan Lunag
- Tandusnya lahan perkebunan sawit yang sudah berumur diatas 25 tahun

Dari faktor internal dan faktor ekstarnal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :

- Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Lunang
- Sumber daya manusia yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian dan perkebunan
- Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sector kepariwisataan

2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat dan pelatihan-pelatihan
- Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
- Meningkatkan koordinasi ditingkat kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- Bekerja sama dengan dinas instansi terkait untuk mengadakan palatihan teknologi tepat guna
- Menjalin kerja sama dengan dinas peternakan upaya dalam menyuburkan kembali wilayah perkebunan yang sudah mulai tandus.

**3.2. TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi merupakan arah pertimbangan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMASIS DAN SEJAHTERA” maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir selatan, yaitu :

Mandiri : Berdiri sendiri yaitu dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal

Unggul : Masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Agamais : Suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat

Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bias mendongkrak peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama

dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari akademik dan social dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sector unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan menegembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminallitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir selatan untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sector, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya

dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

### **3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG RUANG (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah Kabupaten Pesisir selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mekalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataa Ruang Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan.
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata.
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara selatan.
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolahan yang ramah lingkungan.
7. Peningkatan sector ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Peningkatan potensi sumberdaya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam.

9. Pengembangan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan.
10. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

#### **3.4. PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari bermacam isu strategis disemua urusan penyelenggara pemerintahan, yang menjadi isu utama untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan public.
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. VISI OPD**

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 – 2021. Visi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh OPD.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Lunang adalah :

**“Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik menuju pelayanan prima”**

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Lunang sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan motto Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu **Tekadku Membangun Kabupaten Pesisir Selatan**

#### **4.2. MISI OPD**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi diatas, maka ada beberapa misi yang harus dicapai yaitu :

1. Memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Memantapkan koordinasi pelaksana pembangunan

3. Memantapkan Koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

#### **4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi kecamatan Lunang tahun 2016-2021, sebagai berikut :

**TABEL IV.1**  
**TUJUAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 2021
<b>MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat</b>			
1.	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu	90 %
2.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	BB
3.	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	10 nagari

**TABEL : IV.II**  
**SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD**

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat</b>								
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	75 %	80 %	80 %	80 %	85 %	90 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	C	B	B	BB	BB	BB
3.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	3 Nagari	5 Nagari	7 Nagari	8 Nagari	9 Nagari	10 Nagari

#### 4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan seperti tabel berikut ini :

**TABEL :**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI : Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik menuju Pelayanan Prima</b>			
<b>MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Melengkapi sarana dan prasarana kantor	Kelengkapan sarana dan prasarana kantor
Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan professional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	Penyediaan sarana dan prasarana kantor	Meningkatkan sarana kerja aparatur
Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Seringnya melakukan pertemuan dengan pemerintahan nagari	Melakukan Pembinaan langsung Ke seluruh Nagari

**BAB V**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Lunang**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Kantor Camat Lunang			
		1.02.21.05	Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat		0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	4.312.500,00	0 Bulan	4.312.500,00	Kantor Camat Lunang		
		1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		65 %	419.691.420,00	70 %	430.183.710,00	75 %	440.938.300,00	80 %	451.961.760,00	90 %	463.260.800,00	440,00 %	2.206.035.990,00		0,00	Kantor Camat Lunang		
				Penggunaan penyandang masalah kesejahteraan		15,540 -	0,00	18,950 -	0,00	20,650 -	0,00	23,720 -	0,00	25,850 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00 -	0,00	0,00		
				Persentase nagari menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran		- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
		1.06.16.14	Distribusi Raskin	Jumlah nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran		10 Nagari	3.000.000,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	3.000.000,00	0 Nagari	3.000.000,00	Kantor Camat Lunang	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	2.12.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP bersatuan penduduk		0,86 tanpa satuan	3.291.257.330,00	0,88 tanpa satuan	4.873.538.770,00	0,91 tanpa satuan	4.995.377.230,00	0,93 tanpa satuan	5.120.262.000,00	0,95 tanpa satuan	5.248.268.210,00	0,00 tanpa satuan	23.528.703.540,00		0,00	Kantor Camat Lunang		
				Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Keluarga		96,54 persen	0,00	97,25 persen	0,00	97,97 persen	0,00	97,99 persen	0,00	98,69 persen	0,00	95,00 persen	0,00	95,00 persen	0,00	0,00		
				Persentase peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		0,58 persen	0,00	17,27 persen	0,00	28,78 persen	0,00	40,30 persen	0,00	51,81 persen	0,00	0,00 persen	0,00	0,00 persen	0,00	0,00		
				Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk		381,28 tanpa satuan	0,00	457,57 tanpa satuan	0,00	594,79 tanpa satuan	0,00	684,79 tanpa satuan	0,00	820,81 tanpa satuan	0,00	0,00 tanpa satuan	0,00	0,00 tanpa satuan	0,00	0,00		
		2.12.15.15	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP elektronik)	Jumlah Kartu yang tersedia		350 Kartu	4.012.000,00	0 Kartu	0,00	0 Kartu	0,00	0 Kartu	0,00	0 Kartu	0,00	4.012.000,00	0 Kartu	4.012.000,00	Kantor Camat Lunang			
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	2.13.20	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	Persentase PKK nagari yang aktif		65,00 %	1.351.079.000,00	70,00 %	1.384.856.000,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	60,00 %	2.735.935.000,00		0,00	Kantor Camat Lunang		
				persentase KAN yang aktif		64,86 %	0,00	71,97 %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
				Persentase LPM yang aktif membina kelompok		65,05 %	0,00	70,43 %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
				Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif		- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
		2.13.20.10	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang dibina		0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	10 Nagari	32.575.000,00	10 Nagari	36.100.000,00	0 Nagari	68.675.000,00	0 Nagari	68.675.000,00	Kantor Camat Lunang		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	2.18.18	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		2500 -	338.636.300,00	2500 -	347.102.210,00	3000 -	389.472.740,00	3000 -	440.263.000,00	3500 -	489.830.740,00	17000,00 -	2.005.304.990,00		0,00	Kantor Camat Lunang		
				Persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan		- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
		2.18.18.06	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi		0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	50 Rekomendasi	2.250.000,00	50 Rekomendasi	3.850.000,00	0 Rekomendasi	6.100.000,00	0 Rekomendasi	6.100.000,00	Kantor Camat Lunang		
Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi destinasi utama wisata bahari di Sumatera Barat	3.26.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisata		2.351.700 orang	3.252.555.230,00	2.601.800 orang	3.333.869.110,00	2.891.850 orang	3.347.204.590,00	2.901.900 orang	3.360.593.410,00	3.002.000 orang	3.374.035.780,00	0 orang	16.668.258.120,00		0,00	Kantor Camat Lunang		
				Persentase produk unggulan nagari yang diminati pengunjung		- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
		3.26.15.14	Pelaksanaan festival Langkisau	Terlaksananya Festival Langkisau		1 Paket	9.712.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	9.712.000,00	0 Paket	9.712.000,00	Kantor Camat Lunang	
		3.26.15.18	Kegiatannya pergelaran seni budaya dan potensi daerah	Jumlah event pariwisata yang diikuti		0 Paket	0,00	1 Paket	7.503.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	7.503.000,00	0 Paket	7.503.000,00	Kantor Camat Lunang			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya Pemerintahan yang Berkualitas, Akuntabel dan Bebas KKN	4.01.16	Peningkatan IMTAQ	Persentase kepuasan terhadap pelayanan jemaah haji oleh Pemerintah Daerah		90 -	2.173.666.000,00	100 -	2.228.007.700,00	100 -	2.235.000.000,00	100 -	2.270.000.000,00	100 -	2.270.000.000,00	490,00 -	11.176.673.700,00		0,00	Kantor Camat Lunang		
				Peringkat MTQ Pesisir Selatan		7 besar	0,00	5 besar	0,00	5 besar	0,00	5 besar	0,00	5 besar	0,00	35,00 besar	0,00	0,00				
				Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI		- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00		

				Persentase lembaga didikan subuh yang dikunjungi	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Persentase jumlah kunjungan tim penda	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.01.16.04	Fasilitas Penyelenggaraan MTQ	Jumlah MTQ yang diikuti	0 Kali	0,00	1 Kali	38.695.000,00	0 Kali	0,00	1 Kali	51.025.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	89.720.000,00	Kantor Camat Lunang	
		4.01.16.09	Fasilitas dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah MTQ yang diikuti	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	54.025.000,00	0 Kali	54.025.000,00	Kantor Camat Lunang	
				Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang difasilitasi	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	1 kali	12.500.000,00	0 kali	12.500.000,00		
				Jumlah Kunjungan Safari Ramadhan ke Nagari	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	12.500.000,00	0 Kali	12.500.000,00		
				Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang dikunjungi	0 LDS yang di kunjungi	0,00	0 LDS yang di kunjungi	0,00	0 LDS yang di kunjungi	0,00	0 LDS yang di kunjungi	0,00	11 LDS yang di kunjungi	12.500.000,00	0 LDS yang di kunjungi	12.500.000,00		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	4.01.24	Program pematapan otonomi daerah	Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif pemerintahan	0 %	6.061.782.900,00	30 %	6.213.327.400,00	35 %	6.368.660.600,00	50 %	6.527.877.100,00	75 %	6.691.074.000,00	190,00 %	31.862.722.000,00	Kantor Camat Lunang	
				Persentase tahapan pembakuan nama Rupa Bumi	0 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	400,00 %	0,00		
				Persentase nagari binaan perantau	0 %	0,00	17 %	0,00	18 %	0,00	20 %	0,00	25 %	0,00	80,00 %	0,00		
				Persentase penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintah daerah	65 %	0,00	67 %	0,00	66 %	0,00	67 %	0,00	70 %	0,00	395,00 %	0,00		
				Jumlah kerjasama dengan Pihak Ketiga	12 MoU	0,00	14 MoU	0,00	15 MoU	0,00	17 MoU	0,00	20 MoU	0,00	88,00 MoU	0,00		
				Persentase kehadiran stakeholder pada rapat koordinasi pimpinan daerah	90 %	0,00	90 %	0,00	90 %	0,00	90 %	0,00	90 %	0,00	450,00 %	0,00		
		4.01.24.02	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah Nagari yang dibina	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	10 Nagari	7.600.000,00	10 Nagari	19.030.000,00	10 Nagari	19.030.000,00	0 Nagari	45.660.000,00	Kantor Camat Lunang	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	5.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan daerah yang selaras	66 persen	2.134.523.130,00	100 persen	2.187.886.210,00	100 persen	2.242.583.000,00	100 persen	2.298.648.000,00	100 persen	2.356.114.000,00	499,00 persen	11.219.754.340,00	Kantor Camat Lunang	
				Persentase usulan/ kegiatan Musrenbang Nagari yang diverifikasi sesuai dengan program prioritas	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00		
		5.01.21.09	Penyelenggaran Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas	0 Usulan	0,00	0 Usulan	0,00	12 Usulan	18.665.000,00	8 Usulan	9.405.000,00	10 Usulan	13.175.000,00	0 Usulan	41.245.000,00	Kantor Camat Lunang	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya Pemerintahan yang Berkinerja, Akuntabel dan Bebas KKN	5.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	90 %	377.306.810,00	90 %	386.739.280,00	90 %	396.407.760,00	90 %	406.317.950,00	90 %	416.475.090,00	540,00 %	1.983.246.690,00	Kantor Camat Lunang	
		5.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen yang tersedia	1 Dokumen	3.249.400,00	1 Dokumen	2.497.372,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	5.746.772,00	Kantor Camat Lunang	
		5.02.06.17	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersedia	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	5.665.557,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	5.665.557,00	Kantor Camat Lunang	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik berkinerja	5.02.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Nagari	90 %	244.356.730,00	90 %	250.465.650,00	90 %	252.110.000,00	90 %	249.850.000,00	90 %	254.700.000,00	540,00 %	1.251.482.380,00	Kantor Camat Lunang	
				Persentase tata kelola keuangan nagari yang baik	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	- %	0,00	0,00 %	0,00		
		5.02.17.04	Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	10 Nagari	21.152.000,00	10 Nagari	13.546.100,00	10 Nagari	4.840.000,00	10 Nagari	5.100.000,00	10 Nagari	8.800.000,00	0 Nagari	53.438.100,00	Kantor Camat Lunang	
		5.02.17.05	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah pengelolaan Keuangan Nagari yang baik	0 Nagari	0,00	10 Nagari	1.394.185,00	10 Nagari	600.000,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	1.994.185,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi perkantoran	12 bulan	3.411.406.150,00	12 bulan	3.496.691.310,00	12 bulan	3.584.108.590,00	12 bulan	3.673.711.300,00	12 bulan	3.765.554.090,00	72,00 bulan	17.931.471.440,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	6.800.000,00	12 Bulan	7.200.000,00	12 Bulan	7.200.000,00	12 Bulan	7.200.000,00	12 Bulan	7.200.000,00	0 Bulan	35.600.000,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Pengelolaan Kegiatan	12 Bulan	26.100.000,00	12 Bulan	36.300.000,00	12 Bulan	50.100.000,00	12 Bulan	30.837.000,00	12 Bulan	36.837.000,00	0 Bulan	180.174.000,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	2.572.800,00	12 Bulan	21.713.177,00	12 Bulan	21.418.325,00	12 Bulan	28.656.051,00	12 Bulan	28.656.051,00	0 Bulan	103.016.404,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Kantor Untuk ATK	12 Bulan	9.821.600,00	12 Bulan	15.700.467,00	12 Bulan	30.860.369,00	12 Bulan	26.998.925,00	12 Bulan	27.022.025,00	0 Bulan	110.403.386,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	5.518.100,00	12 Bulan	6.281.200,00	12 Bulan	12.441.600,00	12 Bulan	12.498.600,00	12 Bulan	12.498.600,00	0 Bulan	49.238.100,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	1.900.000,00	12 Bulan	1.500.000,00	12 Bulan	1.814.080,00	12 Bulan	1.248.448,00	12 Bulan	1.248.448,00	0 Bulan	7.710.976,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	12 Bulan	1.200.000,00	12 Bulan	1.200.000,00	12 Bulan	1.200.000,00	12 Bulan	1.200.000,00	12 Bulan	1.200.000,00	0 Bulan	6.000.000,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makan dan Minuman Dalam Kegiatan Rapat	12 Bulan	13.225.000,00	12 Bulan	12.374.000,00	12 Bulan	16.950.000,00	12 Bulan	22.000.000,00	12 Bulan	22.000.000,00	0 Bulan	86.549.000,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	39.300.000,00	12 Bulan	51.996.000,00	12 Bulan	17.550.000,00	12 Bulan	30.750.000,00	12 Bulan	30.750.000,00	0 Bulan	170.346.000,00	Kantor Camat Lunang	
		7.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 Bulan	126.400.000,00	12 Bulan	134.200.000,00	12 Bulan	124.140.000,00	12 Bulan	78.350.000,00	12 Bulan	125.700.000,00	0 Bulan	588.790.000,00	Kantor Camat Lunang	

		7.01.01.23	Penyediaan Jasa Publikasi	Tersedianya Jasa Publikasi		12 Bulan	1.000.000,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	1.000.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.01.24	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Tersedianya Jasa tenaga Kerja Non PNS		12 Bulan	26.000.000,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	26.000.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.01.30	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Operasional Perencanaan dan Pelaporan		0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	14.600.000,00	12 Bulan	7.550.000,00	12 Bulan	10.550.000,00	0 Bulan	32.700.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.01.35	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya RENSTRA SKPD		12 Dokumen	2.700.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	2.700.000,00	Kantor Camat Lunang
		<b>7.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja</b>		<b>12 bulan</b>	<b>2.113.553.780,00</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.166.392.620,00</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.220.552.440,00</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.276.066.250,00</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.332.967.900,00</b>	<b>72,00 bulan</b>	<b>11.109.532.990,00</b>	<b>Kantor Camat Lunang</b>
		7.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	5.500.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	5.500.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor		1 Paket	37.400.000,00	1 Paket	13.950.000,00	1 Paket	5.150.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	56.500.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		1 Paket	28.261.000,00	1 Paket	2.339.000,00	1 Paket	26.262.975,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	56.862.975,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas		0 Bulan	0,00	12 Bulan	13.000.000,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	13.000.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	45.000.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	0 Bulan	97.000.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		12 Bulan	28.584.200,00	12 Bulan	39.950.000,00	12 Bulan	43.983.876,00	12 Bulan	58.123.876,00	12 Bulan	58.123.876,00	0 Bulan	228.765.828,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		12 Bulan	3.500.000,00	12 Bulan	4.400.000,00	12 Bulan	8.100.000,00	12 Bulan	1.900.000,00	12 Bulan	1.900.000,00	0 Bulan	19.800.000,00	Kantor Camat Lunang
		<b>7.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya</b>		<b>12 Orang</b>	<b>138.980.000,00</b>	<b>12 Orang</b>	<b>142.454.500,00</b>	<b>12 Orang</b>	<b>146.015.860,00</b>	<b>12 Orang</b>	<b>149.666.260,00</b>	<b>12 Orang</b>	<b>153.407.920,00</b>	<b>72,00 Orang</b>	<b>730.524.540,00</b>	<b>Kantor Camat Lunang</b>
		7.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		9 Orang	5.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	5.000.000,00	Kantor Camat Lunang
		<b>7.01.15</b>	<b>Program Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Musrenbang Kecamatan</b>		<b>--</b>	<b>15.944.196.000,00</b>	<b>1 -</b>	<b>16.342.800.900,00</b>	<b>1 -</b>	<b>16.751.370.900,00</b>	<b>1 -</b>	<b>17.170.155.200,00</b>	<b>1 -</b>	<b>17.599.409.100,00</b>	<b>0 -</b>	<b>83.807.932.100,00</b>	<b>Kantor Camat Lunang</b>
				<b>Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dengan muspika</b>		<b>- kali</b>	<b>0,00</b>	<b>4 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>4 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>4 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>4 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00 kali</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat</b>		<b>- kali</b>	<b>0,00</b>	<b>1 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>1 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>1 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>1 kali</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00 kali</b>	<b>0,00</b>	
		7.01.15.01	Pembinaan PKK Kecamatan	Jumlah PKK Nagari yang dibina		10 Nagari	36.425.000,00	10 Nagari	29.440.000,00	10 Nagari	38.910.000,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	104.775.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.15.02	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah bhakti gotong royong yang dilaksanakan/dikuti		10 Nagari	17.404.000,00	10 Nagari	1.845.000,00	10 Nagari	8.025.000,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	27.274.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.15.03	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan Kecamatan		1 Paket	17.238.000,00	1 Paket	9.095.450,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	26.333.450,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.15.05	Kordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah rapat yang dilaksanakan/dikuti		12 Bulan	10.998.000,00	12 Bulan	7.500.000,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	18.498.000,00	Kantor Camat Lunang
		7.01.15.09	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang difasilitasi		150 Rekomendasi	13.629.800,00	50 Rekomendasi	2.550.555,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	16.180.355,00	Kantor Camat Lunang
		<b>8.01.15</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus penakut narkoba tingkat siswa dan aparat</b>		<b>70 %</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>75 %</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>80 %</b>	<b>810.000.000,00</b>	<b>85 %</b>	<b>890.000.000,00</b>	<b>100 %</b>	<b>890.000.000,00</b>	<b>410,00 %</b>	<b>4.040.000.000,00</b>	<b>Kantor Camat Lunang</b>
				<b>Persentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI</b>		<b>- %</b>	<b>0,00</b>	<b>- %</b>	<b>0,00</b>	<b>- %</b>	<b>0,00</b>	<b>- %</b>	<b>0,00</b>	<b>- %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	
		8.01.15.04	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan PHBN		0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	37.975.000,00	0 Kali	37.975.000,00	Kantor Camat Lunang
		8.01.15.05	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah Pelaksanaan PHBN		1 Kali	31.420.000,00	1 Kali	31.165.000,00	1 Kali	38.550.000,00	1 Kali	36.600.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	137.735.000,00	Kantor Camat Lunang
		<b>8.01.17</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>Persentase jumlah ormas/LSM yang memenuhi syarat administrasi yang lengkap</b>		<b>80 %</b>	<b>680.000.000,00</b>	<b>80 %</b>	<b>745.000.000,00</b>	<b>85 %</b>	<b>815.000.000,00</b>	<b>90 %</b>	<b>885.000.000,00</b>	<b>95 %</b>	<b>885.000.000,00</b>	<b>510,00 %</b>	<b>4.010.000.000,00</b>	<b>Kantor Camat Lunang</b>
		8.01.17.12	Fasilitasi dan Monitoring Pemilihan Wali nagari	Jumlah Nagari yang melaksanakan pemilukada sesuai aturan		0 Nagari	0,00	6 Nagari	3.845.500,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	0,00	0 Nagari	3.845.500,00	Kantor Camat Lunang



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.


Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 seperti Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 Terlampir.

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 satuan organisasi perangkat daerah (OPD) Kantor Camat Lunang digunakan sebagai pedoman melaksanakan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja (RENJA SKPD) dan rencana kerja tahunan (RKT).

Perencanaan strategis (RENSTRA) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok yang dipercayakan kepada setiap dinas instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

**Camat Lunang**  
  
**\*Lyonica Ventira, S.IP**  
**NIP. 19870929 200701 2 001**

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase pelayanan yang tepat waktu	75%	75%	80%	80%	80%	85%	90%	90%
2	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	C	C	B	B	BB	BB	BB	BB
3	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	3 Nagari	3 Nagari	5 Nagari	7 Nagari	8 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	10 Nagari

Lunang  
 Juli 2020  
 PEMERINTAH KABUPATEN LUNANG  
 KECAMATAN LUNANG  
 LYONICA VENTIRA, S.I.P  
 NIP.19870920200701 2 001  
 PESISIR SELATAN



**TABEL 6.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**KANTOR CAMAT LUNANG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	90%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	BB
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	10 Nagari

